
**ANALISIS PENGEMBANGAN DESA WISATA DALAM
MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA DESA HUTA TINGGI
KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

Oktaveri TD Barimbing¹, Vera A. Pasaribu², Artha L. Tobing³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan

oktaveri.barimbing@student.uhn.ac.id¹, verapasaribu@uhn.ac.id²,
artha.tobing@uhn.ac.id³

ABSTRACT: This study aims to analyze the development of Huta Tinggi Tourism Village in terms of increasing tourist visits in Pangururan District, Samosir Regency. The research focuses on tourism village development strategies, community participation, supporting and inhibiting factors, and the implications for increasing tourist numbers. A qualitative approach with a descriptive method was employed. Research informants included the Village Head, administrators of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), MSME players, community leaders, tourists, and representatives from the Samosir Regency Culture and Tourism Office. Data collection involved observation, in-depth interviews, and documentation, while data analysis utilized the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña, comprising data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the development of Huta Tinggi Tourism Village was achieved through strengthening natural and cultural attractions, improving amenities, enhancing accessibility, utilizing digital promotion, and implementing community empowerment based on Community-Based Tourism principles. Community participation was a key factor in the successful management of the tourism village, evidenced by involvement in providing homestays, culinary services, handicrafts, and cultural attractions, as well as environmental conservation efforts. Supporting factors included natural potential, Toba Batak culture, government support, and the presence of the Pokdarwis, whereas inhibiting factors included limitations in human resource quality, supporting facilities, access to capital, and suboptimal promotion. The development of the tourism village has proven to have a positive impact on increasing tourist visits, fostering MSME growth, creating jobs, and raising community income. This study concludes that tourism village development grounded in community participation and sustainable tourism principles serves as an effective strategy to enhance destination competitiveness while supporting local economic development in Samosir Regency.

Keywords: *Tourism Village, Tourism Village Development, Tourist Visits, Community Participation, Sustainable Tourism*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi dalam meningkatkan kunjungan wisata di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Fokus penelitian meliputi strategi pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat, serta

implikasinya terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku UMKM, tokoh masyarakat, wisatawan, dan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi dilakukan melalui penguatan atraksi wisata alam dan budaya, peningkatan amenitas, pengembangan aksesibilitas, promosi digital, serta pemberdayaan masyarakat berbasis *Community Based Tourism*. Partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan desa wisata melalui keterlibatan dalam penyediaan homestay, kuliner, kerajinan, atraksi budaya, dan pelestarian lingkungan. Faktor pendukung meliputi potensi alam, budaya Batak Toba, dukungan pemerintah, serta keberadaan Pokdarwis, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan kualitas sumber daya manusia, fasilitas pendukung, akses permodalan, dan promosi yang belum optimal. Pengembangan desa wisata terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan desa wisata yang berbasis partisipasi masyarakat dan prinsip pariwisata berkelanjutan menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing destinasi sekaligus mendukung pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Samosir.

Kata Kunci: Desa Wisata, Pengembangan Desa Wisata, Kunjungan Wisatawan, Partisipasi Masyarakat, Pariwisata Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pariwisata berkembang menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional karena dinilai mampu menciptakan efek multiplier terhadap berbagai sektor lain seperti perdagangan, transportasi, kuliner, perhotelan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Oleh sebab itu, berbagai strategi dilakukan pemerintah untuk memperkuat daya saing destinasi wisata, salah satunya melalui pengembangan desa wisata.

Konsep desa wisata berkembang sebagai model pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi. Desa wisata tidak hanya dipahami sebagai lokasi wisata, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal

secara berkelanjutan. Pengembangan desa wisata menjadi penting karena mampu menciptakan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan masyarakat setempat.

Pengembangan desa wisata juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung pembangunan kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas nasional. Kawasan Danau Toba memiliki daya tarik wisata yang sangat besar karena memadukan keindahan alam, sejarah, budaya, dan tradisi masyarakat Batak yang unik. Salah satu daerah yang menjadi pusat pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba adalah Kabupaten Samosir. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu ikon wisata budaya Batak dengan potensi wisata alam dan budaya yang sangat kaya. Berbagai objek wisata alam, situs budaya, kuliner tradisional, hingga aktivitas adat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun demikian, perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Samosir masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun memiliki potensi wisata yang besar, tingkat kunjungan wisatawan pada beberapa desa wisata belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wisata yang dimiliki dengan kualitas pengelolaan destinasi wisata di lapangan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur wisata, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, promosi wisata, partisipasi masyarakat, inovasi produk wisata, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata adalah Huta Tinggi yang berada di Kecamatan Pangururan. Desa ini memiliki berbagai potensi wisata yang cukup lengkap, mulai dari panorama alam yang indah, budaya masyarakat Batak yang masih kental, aktivitas adat istiadat, kerajinan tradisional, hingga potensi wisata kuliner khas daerah. Selain itu, karakteristik sosial masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin memperoleh pengalaman wisata berbasis budaya dan kehidupan masyarakat tradisional.

Tabel 1.1

Daftar Kunjungan Wisatawan Dan Realisasi Tahun 2023-2025

Tahun	Target Kunjungan Wisatawan (Orang)	Realisasi Kunjungan (Orang)	Persentase Capaian (%)
2023	7.000	6.500	92,8
2024	9.000	8.200	91,1
2025	11.000	10.450	95,0

Sumber: Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kab. Samosir

Dari tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa target kunjungan wisatawan Desa Wisata Huta Tinggi mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan upaya pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat. Pada tahun 2023 target kunjungan wisatawan ditetapkan sebanyak 7.000 pengunjung dengan realisasi kunjungan mencapai 6.500 wisatawan atau sebesar 92,8% dari target yang telah ditentukan. Selanjutnya pada tahun 2024

target kunjungan meningkat menjadi 9.000 wisatawan dan realisasi kunjungan mencapai 8.200 wisatawan atau sebesar 91,1%.

Pada tahun 2025 target kunjungan wisatawan kembali meningkat menjadi 11.000 pengunjung dengan realisasi kunjungan mencapai sekitar 10.450 wisatawan atau sebesar 95% dari target yang ditetapkan. Peningkatan target kunjungan tersebut dipengaruhi oleh pengembangan atraksi wisata budaya, promosi digital, peningkatan fasilitas wisata, serta meningkatnya kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba dan Kabupaten Samosir. Selain itu, pelaksanaan kegiatan budaya lokal dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata juga turut mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Huta Tinggi.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa potensi wisata yang dimiliki Huta Tinggi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan secara optimal. Keberadaan potensi wisata budaya dan alam belum didukung oleh pengelolaan destinasi yang profesional dan berkelanjutan. Kondisi tersebut terlihat dari masih terbatasnya fasilitas pendukung wisata, rendahnya kualitas promosi digital, belum optimalnya aksesibilitas menuju lokasi wisata tertentu, serta kurangnya inovasi atraksi wisata yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung secara berulang.

Di era digital saat ini, perilaku wisatawan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Wisatawan modern tidak hanya mencari destinasi wisata yang indah, tetapi juga pengalaman wisata yang unik, autentik, mudah diakses, dan aktif dipromosikan melalui media digital. Wisatawan cenderung memilih destinasi yang memiliki fasilitas memadai, informasi wisata yang mudah diperoleh, serta pelayanan wisata yang berkualitas. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di Huta Tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam promosi wisata masih belum maksimal. Informasi mengenai potensi wisata desa masih terbatas sehingga desa wisata kurang dikenal secara luas oleh wisatawan di luar daerah.

Selain itu, fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata juga menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan kunjungan wisatawan. Sebagian masyarakat masih memandang pariwisata sebagai aktivitas yang hanya dikelola pemerintah atau kelompok tertentu sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata, pengelolaan homestay, pemasaran produk lokal, dan pelayanan wisata belum berjalan secara optimal. Padahal, keberhasilan desa wisata sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas.

Fenomena lainnya terlihat pada kondisi sarana dan prasarana wisata yang masih terbatas. Beberapa fasilitas pendukung wisata seperti tempat parkir, toilet umum, pusat informasi wisata, papan petunjuk arah, serta area pendukung aktivitas wisata masih memerlukan pengembangan. Infrastruktur yang kurang memadai dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan dan berdampak pada rendahnya minat kunjungan ulang wisatawan. Dalam persaingan destinasi wisata yang semakin ketat, kualitas fasilitas dan pelayanan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik suatu destinasi wisata.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai pengembangan desa wisata dalam meningkatkan kunjungan wisata di Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial berdasarkan perspektif informan melalui pengamatan langsung di lapangan. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata terkait pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat, dan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kunjungan wisatawan

PEMBAHASAN

Konsep Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya suatu daerah maupun negara. Dalam perkembangannya, pariwisata tidak hanya dipandang sebagai aktivitas perjalanan untuk rekreasi semata, tetapi telah berkembang menjadi industri yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah. Oleh karena itu, pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang terus dikembangkan oleh pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu “pari” yang berarti berulang-ulang atau berkeliling dan “wisata” yang berarti perjalanan atau bepergian. Dengan demikian, pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan secara berulang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu. Dalam pengertian modern, pariwisata berkembang menjadi suatu sistem yang melibatkan berbagai aktivitas perjalanan, pelayanan, fasilitas, dan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Definisi ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak pihak dan saling berkaitan dalam mendukung aktivitas wisata.

Menurut World Tourism Organization (UNWTO), pariwisata adalah aktivitas seseorang yang melakukan perjalanan dan tinggal di luar lingkungan tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan rekreasi, bisnis, maupun kepentingan lainnya. Sementara itu, menurut Yoeti, pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan memperoleh kesenangan dan bukan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.

Konsep pariwisata pada dasarnya mencakup beberapa unsur penting, yaitu wisatawan, destinasi wisata, fasilitas pendukung, transportasi, pelayanan, dan masyarakat lokal. Semua unsur tersebut saling berkaitan dalam menciptakan

pengalaman wisata yang menarik dan memuaskan bagi wisatawan. Oleh sebab itu, keberhasilan pengembangan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan seluruh komponen tersebut.

Dalam ilmu pariwisata dikenal konsep 4A yang menjadi komponen utama dalam pengembangan destinasi wisata, yaitu Attraction, Accessibility, Amenities, dan Ancillary Services.

1. Attraction (Atraksi Wisata)

Atraksi wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk dikunjungi. Atraksi wisata dapat berupa keindahan alam, budaya, sejarah, tradisi, kuliner, maupun kegiatan masyarakat. Atraksi menjadi unsur utama dalam pariwisata karena menjadi alasan utama wisatawan melakukan perjalanan.

2. Accessibility (Aksesibilitas)

Aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan wisatawan dalam mencapai destinasi wisata. Aksesibilitas meliputi kondisi jalan, transportasi, petunjuk arah, dan sarana transportasi menuju lokasi wisata. Semakin mudah suatu destinasi dijangkau, maka semakin besar peluang meningkatnya kunjungan wisatawan.

3. Amenities (Fasilitas Pendukung)

Amenities merupakan fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan selama berada di destinasi wisata. Fasilitas tersebut meliputi penginapan, restoran, toilet umum, tempat ibadah, area parkir, dan fasilitas lainnya. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat memengaruhi kepuasan wisatawan.

4. Ancillary Services (Pelayanan Tambahan)

Pelayanan tambahan mencakup organisasi pengelola wisata, pusat informasi wisata, keamanan, promosi wisata, dan layanan lainnya yang mendukung aktivitas wisatawan. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan kualitas destinasi wisata.

Dalam perkembangannya, konsep pariwisata juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan perilaku wisatawan. Wisatawan modern tidak hanya mencari tempat yang indah, tetapi juga pengalaman yang unik, autentik, dan berkesan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata saat ini lebih menekankan pada pengalaman wisata (experience tourism), di mana wisatawan ingin terlibat langsung dengan budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat lokal.

Selain itu, konsep pariwisata modern juga menekankan pentingnya pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pengembangan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Konsep ini bertujuan agar kegiatan pariwisata tidak merusak lingkungan dan budaya lokal, tetapi mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Menurut WTO, pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, budaya lokal, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Dalam konteks pembangunan daerah, pariwisata memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Sektor pariwisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat

melalui usaha kuliner, penginapan, transportasi, kerajinan tangan, dan berbagai usaha lainnya. Selain itu, pariwisata juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, pengembangan pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik, seperti kerusakan lingkungan, perubahan budaya lokal, kemacetan, dan konflik sosial. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata harus dilakukan secara profesional, partisipatif, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Dengan demikian, konsep pariwisata dapat dipahami sebagai suatu sistem aktivitas perjalanan yang melibatkan berbagai komponen pendukung untuk menciptakan pengalaman wisata yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Konsep Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang memanfaatkan potensi lokal desa sebagai daya tarik utama wisata. Konsep desa wisata berkembang seiring dengan perubahan paradigma pembangunan pariwisata yang tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan aspek pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Desa wisata menjadi model pembangunan yang mengintegrasikan kehidupan sosial masyarakat, budaya lokal, aktivitas ekonomi, serta potensi alam ke dalam suatu sistem pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Secara konseptual, desa wisata dapat dipahami sebagai kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari kehidupan sosial masyarakat, adat istiadat, budaya, aktivitas ekonomi, arsitektur, maupun lingkungan alamnya. Keaslian tersebut menjadi daya tarik utama yang membedakan desa wisata dengan destinasi wisata lainnya. Dalam desa wisata, wisatawan tidak hanya menikmati objek wisata, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung terhadap kehidupan masyarakat lokal.

Menurut Nuryanti (2013), desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Teori ini menjelaskan bahwa desa wisata tidak hanya menampilkan potensi wisata berupa objek fisik, tetapi juga keseluruhan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari pengalaman wisata. Dengan demikian, budaya dan kehidupan sosial masyarakat menjadi unsur utama dalam pengembangan desa wisata.

Sementara itu, Inskeep (2021) menjelaskan bahwa desa wisata merupakan bentuk pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Menurutnya, keberhasilan desa wisata sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan wisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan. Teori Inskeep menekankan pentingnya pariwisata berbasis masyarakat sebagai pendekatan utama dalam pengembangan desa wisata.

Menurut Pitana dan Gayatri (2005), desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata karena memiliki daya tarik berupa kehidupan masyarakat, budaya, adat istiadat, dan

lingkungan alam yang masih asli. Mereka menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Pendapat ini memperkuat konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan desa wisata.

Selain itu, Suansri (2003) menyatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat langsung dalam pengembangan serta pengelolaan wisata, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Teori ini menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan wisata, tetapi harus menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat dari aktivitas pariwisata.

Dalam konteks pembangunan daerah, desa wisata memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan desa wisata mampu membuka peluang usaha baru seperti usaha kuliner, homestay, kerajinan tangan, jasa transportasi lokal, dan jasa pemandu wisata. Selain itu, desa wisata juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi urbanisasi masyarakat desa ke kota. Oleh karena itu, desa wisata dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal berbasis potensi masyarakat.

Konsep desa wisata juga berkaitan erat dengan teori pemberdayaan masyarakat. Menurut Adisasmita (2006), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam desa wisata, masyarakat didorong untuk aktif dalam pengelolaan wisata melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis), usaha mikro wisata, dan kegiatan budaya lokal. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan keberlanjutan desa wisata.

Dalam pengembangan desa wisata terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Cooper (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh empat komponen utama yang dikenal dengan konsep 4A, yaitu attraction, accessibility, amenities, dan ancillary services. Attraction berkaitan dengan daya tarik wisata seperti budaya dan alam, accessibility berkaitan dengan kemudahan akses menuju lokasi wisata, amenities berupa fasilitas pendukung wisata, sedangkan ancillary services meliputi kelembagaan dan pelayanan tambahan wisata.

Di era modern, konsep desa wisata juga berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital. Promosi wisata melalui media sosial, website, dan platform digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing desa wisata. Wisatawan modern cenderung mencari informasi destinasi wisata melalui media digital sebelum melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, desa wisata perlu melakukan inovasi promosi dan pengelolaan wisata berbasis digital agar mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya.

Namun demikian, pengembangan desa wisata juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kualitas fasilitas wisata, minimnya promosi, dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, perkembangan pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan perubahan budaya lokal. Oleh

karena itu, pengembangan desa wisata harus dilakukan secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, konsep desa wisata pada dasarnya merupakan bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat sebagai daya tarik wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata merupakan suatu proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi desa yang dilakukan secara terintegrasi untuk menciptakan destinasi wisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga bertujuan memberdayakan masyarakat lokal, melestarikan budaya, serta menciptakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat.

Secara teoritis, pengembangan desa wisata berkaitan erat dengan konsep *community based tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat. Menurut Inskeep (2021), pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam proses pembangunan wisata agar manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam teori ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi memiliki peran aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata.

Menurut Pitana dan Gayatri (2005), pengembangan desa wisata merupakan upaya mengembangkan potensi desa melalui kegiatan wisata yang memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Mereka menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan agar kegiatan pariwisata tidak merusak identitas lokal masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan desa wisata harus dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Konsep pengembangan desa wisata juga dikemukakan oleh Nuryanti (2013) yang menyatakan bahwa desa wisata merupakan integrasi antara atraksi wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat setempat. Berdasarkan teori tersebut, pengembangan desa wisata harus mampu mempertahankan keaslian budaya dan kehidupan masyarakat sebagai daya tarik utama wisata. Keunikan budaya lokal menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat kunjungan wisatawan.

Sementara itu, menurut Suansri (2003), pengembangan desa wisata harus berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dalam seluruh aktivitas wisata. Pengembangan wisata yang tidak melibatkan masyarakat lokal akan sulit menciptakan keberlanjutan dan pemerataan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengelola usaha wisata seperti homestay, kuliner lokal, kerajinan tangan, jasa transportasi, dan kegiatan budaya.

Dalam pengembangan desa wisata terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. Cooper (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh empat komponen utama yang dikenal dengan konsep 4A, yaitu attraction, accessibility, amenities, dan ancillary services.

1. Attraction (Atraksi Wisata)

Atraksi wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Atraksi wisata dapat berupa keindahan alam, budaya lokal, tradisi masyarakat, kuliner khas, seni pertunjukan, maupun aktivitas kehidupan masyarakat desa. Pengembangan atraksi wisata menjadi faktor utama dalam menciptakan identitas dan keunggulan desa wisata.

2. Accessibility (Aksesibilitas)

Aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan wisatawan dalam mencapai lokasi wisata. Infrastruktur jalan, sarana transportasi, petunjuk arah, dan kemudahan akses informasi menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Desa wisata yang memiliki akses mudah cenderung lebih diminati wisatawan.

3. Amenities (Fasilitas Pendukung)

Amenities merupakan fasilitas pendukung yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan selama berada di destinasi wisata. Fasilitas tersebut meliputi penginapan, homestay, restoran, toilet umum, area parkir, pusat informasi wisata, dan fasilitas umum lainnya. Ketersediaan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kepuasan wisatawan.

4. Ancillary Services (Pelayanan Tambahan)

Pelayanan tambahan meliputi kelembagaan pengelola wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), keamanan, promosi wisata, dan kerja sama antar pihak terkait. Kelembagaan yang baik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan desa wisata.

Selain konsep 4A, pengembangan desa wisata juga berkaitan dengan teori pemberdayaan masyarakat. Menurut Adisasmita (2006), pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks desa wisata, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan keterampilan wisata, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi kreatif, dan peningkatan kesadaran wisata masyarakat.

Di era modern, pengembangan desa wisata juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Promosi wisata melalui media sosial, website, dan platform digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing desa wisata. Wisatawan modern cenderung mencari informasi wisata melalui internet sebelum melakukan perjalanan. Oleh karena itu, desa wisata perlu mengembangkan promosi digital agar mampu menjangkau pasar wisata yang lebih luas.

Namun demikian, pengembangan desa wisata juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya promosi, rendahnya kualitas fasilitas wisata, kurangnya dukungan modal, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, perkembangan wisata yang tidak terkontrol juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan pergeseran

budaya lokal. Oleh sebab itu, pengembangan desa wisata harus dilakukan secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, teori pengembangan desa wisata pada dasarnya menekankan pentingnya pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang untuk menciptakan destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kunjungan Wisata

Kunjungan wisatawan merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pengembangan destinasi wisata. Semakin tinggi jumlah kunjungan wisatawan, maka semakin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Pendit (2016), wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu dengan tujuan menikmati objek dan daya tarik wisata. Sementara itu, menurut Cooper (2019), kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh kualitas destinasi wisata, aksesibilitas, fasilitas, keamanan, dan promosi wisata.

Faktor-faktor yang memengaruhi kunjungan wisatawan meliputi:

1. Daya tarik wisata.
2. Kualitas pelayanan wisata.
3. Fasilitas dan infrastruktur.
4. Promosi wisata.
5. Keamanan dan kenyamanan.
6. Kemudahan akses transportasi.
7. Pengalaman wisata yang unik.

Dalam konteks desa wisata, peningkatan kunjungan wisatawan menjadi indikator keberhasilan pengembangan wisata berbasis masyarakat. Kunjungan wisata merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pengembangan sektor pariwisata, khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata. Tingginya tingkat kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa suatu destinasi memiliki daya tarik, fasilitas, dan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan serta harapan wisatawan. Dalam konteks pembangunan pariwisata, kunjungan wisata tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, pengembangan usaha mikro, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Menurut Pendit (2006), wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan sementara dari tempat tinggalnya menuju daerah lain dengan tujuan rekreasi, bisnis, budaya, atau kepentingan lainnya tanpa bermaksud menetap atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi. Sementara itu, kunjungan wisata dapat diartikan sebagai aktivitas kedatangan wisatawan ke suatu destinasi wisata dalam periode tertentu untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang tersedia.

Menurut Cooper (2015), kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu daya tarik wisata (attraction), aksesibilitas (accessibility), fasilitas pendukung (amenities), dan pelayanan tambahan (ancillary services). Keempat komponen tersebut menjadi dasar dalam menentukan minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata. Apabila suatu destinasi memiliki daya

tarik yang unik, akses yang mudah, fasilitas memadai, dan pelayanan yang baik, maka peluang meningkatnya kunjungan wisatawan akan semakin besar.

Selain itu, menurut Yoeti (2008), peningkatan kunjungan wisatawan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengalaman wisata yang diperoleh wisatawan selama berada di destinasi wisata. Wisatawan modern tidak hanya mencari keindahan objek wisata, tetapi juga pengalaman yang autentik, pelayanan yang ramah, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan memperoleh informasi wisata. Oleh karena itu, pengelolaan destinasi wisata harus mampu menciptakan pengalaman wisata yang memberikan kepuasan kepada wisatawan agar mendorong kunjungan ulang dan promosi dari mulut ke mulut.

Dalam teori perilaku wisatawan, Mathieson dan Wall (2012) menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan kunjungan wisata dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, kebutuhan rekreasi, kondisi ekonomi, usia, pendidikan, dan gaya hidup wisatawan. Sedangkan faktor eksternal meliputi promosi wisata, kondisi fasilitas wisata, keamanan, budaya lokal, serta perkembangan teknologi informasi.

Di era digital saat ini, kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh promosi digital dan media sosial. Wisatawan cenderung mencari informasi destinasi wisata melalui internet sebelum melakukan perjalanan. Destinasi wisata yang aktif melakukan promosi digital melalui media sosial, website, dan platform wisata online cenderung lebih mudah dikenal dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Dalam konteks desa wisata, kunjungan wisatawan menjadi indikator keberhasilan pengembangan wisata berbasis masyarakat. Semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan, maka semakin besar peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha kuliner, homestay, kerajinan tangan, jasa transportasi, dan usaha wisata lainnya. Oleh sebab itu, pengembangan desa wisata harus mampu meningkatkan daya tarik wisata, kualitas pelayanan, fasilitas, dan promosi agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata. Keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat lokal. Menurut Tosun (2017), partisipasi masyarakat dalam pariwisata merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya wisata. Sedangkan menurut Adisasmita (2018), partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam desa wisata meliputi:

1. Keterlibatan dalam pengelolaan objek wisata.
2. Penyediaan homestay dan kuliner lokal.
3. Pelestarian budaya dan tradisi.
4. Pengembangan kerajinan lokal.
5. Kegiatan promosi wisata.

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap desa wisata sehingga mendukung keberlanjutan pariwisata. Partisipasi masyarakat

merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan desa wisata karena masyarakat lokal menjadi aktor utama dalam pengelolaan dan keberlanjutan kegiatan pariwisata. Dalam konsep desa wisata, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga evaluasi kegiatan wisata. Tingkat partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata karena masyarakat merupakan pemilik sumber daya budaya, sosial, dan lingkungan yang menjadi daya tarik wisata.

Menurut Tosun (2000), partisipasi masyarakat dalam pariwisata merupakan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tosun menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan wisata yang berkelanjutan karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal serta kepentingan langsung terhadap pengelolaan sumber daya wisata.

Sementara itu, menurut Cohen dan Uphoff (2017), partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam empat tahapan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi program. Dalam konteks pengembangan desa wisata, masyarakat diharapkan terlibat mulai dari proses perencanaan program wisata, pengelolaan objek wisata, pengembangan atraksi budaya, hingga pengawasan terhadap keberlanjutan wisata.

Menurut Adisasmita (2006), partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa ide, tenaga, keterampilan, dana, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pengelolaan homestay, usaha kuliner, kerajinan tangan, jasa pemandu wisata, pertunjukan budaya, dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya.

Menurut Suansri (2003), pariwisata berbasis masyarakat adalah bentuk pengelolaan wisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol, mengelola, dan memperoleh manfaat langsung dari kegiatan pariwisata. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan wisata agar manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara merata. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap desa wisata, memperkuat pelestarian budaya lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan keberlanjutan pengelolaan wisata. Masyarakat yang aktif terlibat dalam kegiatan wisata cenderung lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, keamanan wisata, dan pelestarian budaya sebagai aset utama desa wisata.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata juga menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pariwisata, keterbatasan keterampilan, kurangnya dukungan pemerintah, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan wisata.

Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan agar masyarakat mampu berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan desa wisata.

Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Menurut WTO, pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan meliputi:

1. Pelestarian lingkungan.
2. Pelestarian budaya lokal.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat lokal.
5. Pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Konsep ini penting diterapkan dalam pengembangan desa wisata agar manfaat pariwisata dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan pariwisata yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pengelolaan kegiatan pariwisata. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap dampak negatif perkembangan pariwisata massal yang sering menimbulkan kerusakan lingkungan, pergeseran budaya lokal, dan ketimpangan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan dikembangkan untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat pada masa sekarang, tetapi juga tetap menjaga kelangsungan sumber daya bagi generasi mendatang.

Menurut World Tourism Organization (WTO), pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Definisi ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya wisata secara bijaksana agar manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Sementara itu, menurut Inskeep (2021), pariwisata berkelanjutan merupakan pengelolaan seluruh sumber daya wisata dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologi, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung kehidupan masyarakat. Dalam teori ini, pembangunan pariwisata harus dilakukan secara terencana dan memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan alam dan budaya lokal.

Menurut Gunn (2014), pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pengembangan wisata yang mampu menjaga keseimbangan antara kepuasan wisatawan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan pelestarian lingkungan. Artinya, pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat dan kondisi lingkungan.

Konsep pariwisata berkelanjutan memiliki tiga dimensi utama, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan kemampuan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Keberlanjutan sosial budaya berkaitan dengan pelestarian nilai budaya, adat istiadat, dan identitas masyarakat lokal. Sedangkan keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian alam, kebersihan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana.

Dalam konteks desa wisata, konsep pariwisata berkelanjutan sangat penting karena desa wisata umumnya mengandalkan potensi alam dan budaya sebagai daya tarik utama wisata. Pengembangan desa wisata harus mampu menjaga keaslian budaya masyarakat, melestarikan lingkungan, serta melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan keberlanjutan desa wisata karena masyarakat merupakan pemilik langsung sumber daya wisata.

Menurut Sunaryo (2013), penerapan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan wisata dapat dilakukan melalui pengelolaan lingkungan yang baik, pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan ekonomi kreatif, serta penguatan kelembagaan wisata. Selain itu, promosi wisata juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar tidak menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya wisata.

Namun demikian, penerapan konsep pariwisata berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, kurangnya pengawasan terhadap aktivitas wisata, dan tingginya orientasi ekonomi dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata untuk menciptakan pengelolaan wisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan wisata yang mengutamakan keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan guna menciptakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Pengembangan Desa Wisata terhadap Kunjungan Wisatawan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola desa wisata, pengembangan berbagai atraksi wisata telah meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Huta Tinggi. Wisatawan tidak hanya menikmati panorama Bukit Holbung, tetapi juga mengikuti aktivitas wisata budaya, wisata edukasi, serta pengalaman tinggal di homestay milik masyarakat.

Masyarakat menyampaikan bahwa peningkatan jumlah wisatawan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan melalui usaha kuliner, penyewaan homestay, penjualan kopi lokal, kerajinan tangan, transportasi lokal, dan produk olahan susu kerbau (*dali ni horbo*). Selain manfaat ekonomi, pengembangan desa wisata juga memperkuat pelestarian budaya Batak Toba karena berbagai tradisi lokal kembali ditampilkan sebagai bagian dari paket wisata.

Penelitian mengenai potensi daya tarik Huta Tinggi juga menunjukkan bahwa kombinasi wisata alam, budaya, dan edukasi menjadi faktor utama yang menarik wisatawan untuk berkunjung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mewujudkan desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan masih diperlukan penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, optimalisasi promosi digital, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pariwisata. Temuan ini juga sejalan dengan kajian tentang pemberdayaan masyarakat di Huta Tinggi yang menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai fondasi keberlanjutan desa wisata.

Pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi pembangunan wilayah yang memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber daya utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan potensi desa sehingga manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Wisata Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, ditemukan bahwa pengembangan desa wisata telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian agar pengelolaannya semakin optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi dilakukan melalui pendekatan yang mengintegrasikan potensi wisata alam, budaya, dan partisipasi masyarakat. Potensi alam yang dimiliki desa, seperti panorama Danau Toba, kawasan perbukitan, dan udara yang sejuk, menjadi modal utama dalam menarik wisatawan. Di sisi lain, kekayaan budaya Batak Toba berupa rumah adat, seni tari tortor, musik gondang, kain ulos, kuliner tradisional, serta adat istiadat masih terpelihara dengan baik dan menjadi daya tarik wisata budaya yang autentik. Keunikan ini memberikan pengalaman yang tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga edukatif bagi wisatawan.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Nuryanti (1993) yang menyatakan bahwa desa wisata merupakan integrasi antara atraksi wisata, akomodasi, dan kehidupan masyarakat yang menyatu dalam tata kehidupan pedesaan. Desa wisata tidak hanya menjual keindahan alam, tetapi juga menawarkan pengalaman hidup bersama masyarakat lokal. Dalam konteks Huta Tinggi, wisatawan tidak hanya menikmati panorama Bukit Holbung dan Danau Toba, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan budaya, kuliner khas Batak, serta aktivitas pertanian dan peternakan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik Desa Wisata Huta Tinggi telah memenuhi unsur utama desa wisata sebagaimana dikemukakan oleh Nuryanti.

Pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi juga memperlihatkan penerapan konsep *community based tourism* (CBT). Berdasarkan hasil wawancara,

masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan homestay, penyediaan kuliner lokal, jasa pemandu wisata, penjualan cendera mata, serta penyelenggaraan atraksi budaya. Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata telah mengarah pada pemberdayaan masyarakat lokal.

Temuan ini mendukung teori Inskeep (2016) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurut Inskeep, masyarakat merupakan pemilik sumber daya wisata sehingga harus memperoleh manfaat langsung dari kegiatan pariwisata. Di Huta Tinggi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata telah memberikan peluang ekonomi baru melalui pengembangan UMKM, usaha kuliner, homestay, dan jasa wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi sektor hiburan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa.

Pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi juga dapat dianalisis melalui konsep 4A yang dikemukakan oleh Cooper (2015), yaitu Attraction, Accessibility, Amenities, dan Ancillary Services. Berdasarkan hasil penelitian, aspek attraction menjadi kekuatan utama desa wisata. Keberadaan Bukit Holbung, panorama Danau Toba, budaya Batak Toba, wisata edukasi pertanian, serta kuliner tradisional menjadi daya tarik yang sulit ditemukan di destinasi lain. Keaslian budaya dan keindahan alam memberikan nilai tambah yang membedakan Huta Tinggi dengan destinasi wisata lainnya di kawasan Danau Toba.

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju desa wisata. Akses jalan yang semakin baik memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata. Namun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa transportasi umum menuju lokasi masih terbatas sehingga sebagian besar wisatawan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan sewaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena kemudahan akses merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung.

Penelitian menemukan bahwa telah tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti area parkir, toilet umum, homestay, warung makan, gazebo, dan lokasi berkemah. Akan tetapi, jumlah dan kualitas fasilitas tersebut masih belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah wisatawan pada musim liburan. Beberapa wisatawan mengemukakan perlunya penambahan homestay, pusat informasi wisata, papan interpretasi, jaringan internet yang stabil, serta fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan amenitas merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata.

Sementara itu, pada aspek ancillary services, keberadaan Pokdarwis menjadi salah satu kekuatan kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata. Pokdarwis berperan dalam mengoordinasikan kegiatan wisata, menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan promosi, dan menyelenggarakan kegiatan budaya. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek manajemen destinasi, pemasaran

digital, penyusunan paket wisata, dan jejaring kemitraan dengan biro perjalanan wisata.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi promosi yang dilakukan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebelum berkembangnya teknologi digital, promosi wisata lebih banyak dilakukan melalui media cetak dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Saat ini promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Informan menyatakan bahwa sebagian besar wisatawan mengetahui Desa Wisata Huta Tinggi melalui konten digital yang menampilkan panorama Bukit Holbung dan aktivitas budaya masyarakat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa transformasi digital telah menjadi faktor penting dalam pengembangan desa wisata. Perubahan perilaku wisatawan yang lebih banyak mencari informasi melalui internet menuntut pengelola desa wisata untuk mengembangkan strategi pemasaran digital secara profesional. Oleh karena itu, promosi digital tidak lagi sekadar menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi bagian integral dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata. Dari sisi ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat memperoleh tambahan pendapatan melalui usaha homestay, warung makan, penyewaan perlengkapan wisata, penjualan hasil pertanian, kopi lokal, ulos, kerajinan tangan, dan jasa transportasi. Aktivitas ekonomi tersebut menunjukkan adanya efek berganda (*multiplier effect*) dari sektor pariwisata terhadap perekonomian desa.

Temuan ini mendukung pendapat Pitana dan Gayatri (2005) yang menyatakan bahwa sektor pariwisata memiliki kemampuan menciptakan efek pengganda karena mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya. Kehadiran wisatawan akan meningkatkan permintaan terhadap produk lokal sehingga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di Huta Tinggi, manfaat tersebut dirasakan oleh petani, pelaku UMKM, pengrajin, pemilik homestay, hingga pelaku seni budaya.

Selain memberikan manfaat ekonomi, pengembangan desa wisata juga berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat semakin aktif menampilkan pertunjukan tioro, musik gondang, penggunaan ulos, serta kuliner khas Batak sebagai bagian dari paket wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata mampu menjadi media pelestarian budaya apabila dikelola secara tepat. Tradisi yang sebelumnya hanya ditampilkan pada upacara adat kini juga diperkenalkan kepada wisatawan sebagai bagian dari identitas budaya lokal.

Temuan ini sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang dikemukakan oleh UNWTO, yaitu pembangunan pariwisata yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks Huta Tinggi, keberlanjutan tersebut tercermin melalui upaya masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, mempertahankan arsitektur rumah tradisional, serta melestarikan nilai-nilai budaya Batak Toba.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan beberapa kendala yang masih menghambat optimalisasi pengembangan desa wisata. Kendala tersebut

antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan wisata, kemampuan bahasa asing yang masih rendah, promosi digital yang belum terintegrasi, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Sebagian pelaku UMKM juga mengemukakan keterbatasan akses permodalan dan pelatihan usaha sehingga pengembangan produk wisata belum maksimal.

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tantangan utama pengembangan desa wisata di Indonesia umumnya berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, pembiayaan, dan inovasi pemasaran. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta pengembangan inovasi berbasis teknologi.

Dalam perspektif pembangunan daerah, pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi juga mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Samosir Tahun 2022–2032, yang menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan daerah. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing destinasi, memperluas kesempatan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Huta Tinggi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan kepariwisataan Kabupaten Samosir secara keseluruhan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan melalui pemanfaatan potensi alam dan budaya, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta pengembangan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek kualitas sumber daya manusia, inovasi produk wisata, digitalisasi pemasaran, pengembangan amenities, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan strategi pengembangan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada prinsip pariwisata berkelanjutan, Desa Wisata Huta Tinggi memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu desa wisata unggulan di kawasan Danau Toba dan menjadi model pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Indonesia.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor fundamental dalam menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata. Dalam konsep pembangunan berbasis masyarakat, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak, tanggung jawab, serta kesempatan untuk merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, dan mengevaluasi setiap program pembangunan. Konsep tersebut juga menjadi prinsip utama dalam pengembangan desa wisata, di mana masyarakat lokal merupakan pemilik sumber daya sekaligus penerima manfaat utama dari aktivitas kepariwisataan. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan Desa Wisata Huta

Tinggi sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan destinasi wisata.

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat di Desa Wisata Huta Tinggi tergolong cukup baik. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa wisata, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan destinasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif terlibat dalam pengelolaan homestay, usaha kuliner, penyediaan jasa pemandu wisata, penjualan kerajinan tangan, penyelenggaraan atraksi budaya, serta kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan desa. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran bahwa keberhasilan sektor pariwisata akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Cohen dan Uphoff (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terdiri atas empat bentuk utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan (*implementation*), pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, keempat bentuk partisipasi tersebut telah ditemukan di Desa Wisata Huta Tinggi meskipun tingkat keterlibatannya masih bervariasi.

Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pokdarwis, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda. Dalam forum tersebut dibahas berbagai rencana pengembangan desa wisata, seperti pembangunan fasilitas wisata, penyelenggaraan festival budaya, pengembangan homestay, hingga strategi promosi destinasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa memiliki ruang untuk memberikan pendapat mengenai arah pengembangan desa wisata. Hal ini mencerminkan adanya pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas yang mendukung pengembangan desa wisata. Bentuk partisipasi tersebut antara lain pembangunan dan pengelolaan homestay, penyediaan makanan khas Batak Toba, penyewaan kendaraan wisata, pembuatan kerajinan tangan, penyelenggaraan pertunjukan tortor dan gondang, serta pengelolaan lahan parkir dan kebersihan kawasan wisata. Kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri maupun melalui koordinasi Pokdarwis sebagai organisasi penggerak pariwisata desa.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi telah menjadi pelaku utama pembangunan pariwisata. Kondisi ini sesuai dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT) yang dikemukakan oleh Suansri (2003), yang menegaskan bahwa masyarakat lokal harus menjadi pengendali utama dalam pengelolaan sumber daya wisata sehingga manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Selain berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi dari berkembangnya desa wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, peningkatan jumlah wisatawan telah

meningkatkan permintaan terhadap produk lokal seperti kopi Samosir, ulos, makanan tradisional, kerajinan tangan, serta jasa homestay. Beberapa masyarakat juga memperoleh tambahan pendapatan melalui jasa transportasi lokal, penyewaan perlengkapan *camping*, dan pemandu wisata. Dengan demikian, pariwisata telah membuka peluang diversifikasi mata pencaharian yang sebelumnya didominasi oleh sektor pertanian.

Peningkatan pendapatan tersebut menunjukkan adanya *multiplier effect* yang dihasilkan oleh sektor pariwisata. Kehadiran wisatawan tidak hanya menguntungkan pengelola objek wisata, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap sektor perdagangan, jasa, transportasi, pertanian, dan industri rumah tangga. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Pitana dan Gayatri (2005) yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata mampu menciptakan efek pengganda ekonomi melalui peningkatan permintaan terhadap berbagai produk dan jasa lokal.

Selain manfaat ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap pelestarian budaya Batak Toba. Masyarakat secara aktif mempertahankan tradisi adat, pertunjukan tortor, musik gondang, penggunaan ulos, serta penyajian kuliner khas sebagai bagian dari atraksi wisata. Wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga memperoleh pengalaman mengenai kehidupan sosial dan budaya masyarakat Batak. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal.

Dalam perspektif sosial, keterlibatan masyarakat juga memperkuat solidaritas antarwarga. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan gotong royong untuk membersihkan kawasan wisata, memperbaiki fasilitas umum, dan mempersiapkan kegiatan budaya masih menjadi tradisi yang dipertahankan. Nilai gotong royong tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan desa wisata. Modal sosial tersebut menciptakan rasa memiliki terhadap destinasi wisata sehingga masyarakat terdorong untuk menjaga kualitas lingkungan dan pelayanan kepada wisatawan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan Pokdarwis memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pokdarwis berfungsi sebagai wadah koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan Dinas Pariwisata. Organisasi ini bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan promosi, penyusunan paket wisata, pelatihan sumber daya manusia, serta pengelolaan atraksi wisata. Melalui Pokdarwis, masyarakat memperoleh kesempatan mengikuti berbagai pelatihan mengenai pelayanan wisata, pengelolaan homestay, pemasaran digital, dan pengembangan produk wisata.

Peran Pokdarwis tersebut sesuai dengan pedoman pengembangan desa wisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata, yang menempatkan Pokdarwis sebagai lembaga penggerak dalam menciptakan Sapta Pesona, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar anggota Pokdarwis telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip tersebut, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas organisasi agar mampu mengelola destinasi secara lebih profesional.

Meskipun tingkat partisipasi masyarakat cukup baik, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang masih menghambat optimalisasi keterlibatan masyarakat. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan bahasa asing, keterampilan pelayanan wisata, maupun kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran destinasi. Kondisi ini menyebabkan pelayanan terhadap wisatawan mancanegara belum optimal dan promosi digital masih bergantung pada individu tertentu.

Selain itu, keterbatasan akses permodalan juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM dan pengelola homestay. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha, namun terbatas oleh kemampuan finansial sehingga pengembangan fasilitas wisata berjalan relatif lambat. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan pemerintah melalui program pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda masih perlu ditingkatkan. Sebagian pemuda memilih bekerja di luar daerah sehingga keterlibatan mereka dalam pengelolaan desa wisata belum maksimal. Padahal, generasi muda memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan inovasi kreatif yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan destinasi wisata saat ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk mendorong keterlibatan pemuda melalui pembentukan komunitas kreatif, pelatihan digital marketing, pengembangan konten wisata, dan kewirausahaan berbasis pariwisata. Dari perspektif tata kelola, hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, Pokdarwis, pelaku usaha, dan masyarakat telah berjalan cukup baik, tetapi koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat. Pengembangan desa wisata membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan dalam aspek perencanaan, pembiayaan, promosi, hingga evaluasi. Kolaborasi tersebut penting agar setiap program pengembangan tidak berjalan secara parsial, melainkan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga mendukung konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya dalam menyelesaikan permasalahan publik. Dalam konteks Desa Wisata Huta Tinggi, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas destinasi, memperluas jaringan promosi, meningkatkan investasi, serta memperkuat kapasitas masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat di Desa Wisata Huta Tinggi telah menjadi modal utama dalam pengembangan destinasi wisata. Masyarakat telah berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi kegiatan pariwisata. Keterlibatan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pelestarian budaya Batak Toba, penguatan modal sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan wisata. Namun demikian, optimalisasi partisipasi masyarakat masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan Pokdarwis, perluasan akses permodalan bagi UMKM,

peningkatan keterlibatan generasi muda, dan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi faktor pendukung, tetapi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Desa Wisata Huta Tinggi sebagai destinasi wisata yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, semakin besar pula peluang terciptanya peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan di Kabupaten Samosir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengembangan Desa Wisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata di Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan pemanfaatan potensi wisata alam, budaya, dan wisata berbasis masyarakat sebagai daya tarik utama destinasi. Pengembangan tersebut dilakukan melalui peningkatan atraksi wisata, pembangunan amenitas, penguatan aksesibilitas, promosi digital, serta penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Keberadaan Bukit Holbung, panorama Danau Toba, budaya Batak Toba, kuliner khas, dan homestay menjadi komponen utama yang mendukung perkembangan desa wisata.
2. Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi. Masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata. Bentuk partisipasi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan homestay, usaha kuliner, kerajinan tangan, jasa pemandu wisata, penyelenggaraan atraksi budaya, serta kegiatan gotong royong dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Partisipasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan wisata, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap desa wisata.
3. Faktor pendukung pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi meliputi keindahan panorama alam Danau Toba, keberadaan Bukit Holbung sebagai ikon wisata, kekayaan budaya Batak Toba, dukungan pemerintah, keberadaan Pokdarwis, perkembangan promosi digital, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sektor pariwisata. Sebaliknya, faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya fasilitas pendukung wisata, keterbatasan akses permodalan bagi pelaku UMKM, promosi digital yang belum terintegrasi, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan.
4. Pengembangan desa wisata memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Peningkatan kunjungan tersebut dipengaruhi oleh daya tarik wisata yang unik, kemudahan akses, peningkatan fasilitas, promosi digital,

serta pelayanan masyarakat yang ramah. Meningkatnya jumlah wisatawan memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terbukanya lapangan kerja baru, serta meningkatnya permintaan terhadap produk lokal seperti kopi, kuliner khas, ulos, dan kerajinan tangan.

5. Pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi telah mengarah pada penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pelestarian budaya Batak Toba, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata, serta upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi indikator bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada keberlanjutan destinasi. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, digitalisasi pengelolaan destinasi, serta penguatan kelembagaan Pokdarwis.
6. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, Pokdarwis, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata, memperkuat ekonomi masyarakat, melestarikan budaya lokal, serta mendukung implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Samosir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cooper, Chris. 2015. *Tourism: Principles and Practice*. London: Longman Group Limited.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. 2017. *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University.
- Gunn, Clare A. 2014. *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*. Washington DC: Taylor & Francis.
- Inskeep, Edward. 2021. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Mathieson, Alister & Wall, Geoffrey. 2022. *Tourism: Economic, Physical and Social Impacts*. London: Longman.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. 2014. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- Nuryanti, Wiendu. 2013. *Concept, Perspective and Challenges of Tourism Village*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

-
- Pitana, I Gede dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Spillane, James J. 2017. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suansri, Potjana. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project.
- Suwantoro, Gamal. 2017. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tosun, Cevat. 2000. "Limits to Community Participation in the Tourism Development Process in Developing Countries." *Tourism Management*, Vol. 21, No. 6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- World Tourism Organization. 2018. *Sustainable Tourism Development Guidelines*. Madrid: UNWTO.
- Zebua, Tri Indriani, dkk. 2023. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Huta Tinggi Kabupaten Samosir." *Journal of Commerce, Management and Tourism Studies*.